



## Optimalisasi Peran Tenaga Kependidikan dalam Membangun Efektivitas Pengelolaan Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar

Amalia Rizki Wandani<sup>1✉</sup>, Devi Asriani<sup>1</sup>, Elsa Agustina<sup>1</sup>, Prihantini<sup>1</sup>

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia<sup>(1)</sup>

DOI: [10.31004/aulad.v5i1.247](https://doi.org/10.31004/aulad.v5i1.247)

✉ Corresponding author:

[[amaliarizkiwandani13@upi.edu](mailto:amaliarizkiwandani13@upi.edu)]

### Article Info

### Abstrak

#### Kata kunci:

*Optimalisasi;  
efektivitas;  
tenaga kependidikan;  
pengelolaan  
pendidikan;*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan serta implementasi pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar (SD). Pengambilan data dengan kajian literatur, sebuah penelitian melalui pengkajian dari berbagai artikel, jurnal maupun melalui buku elektronik yang ada di internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan mengalami ketimpangan, hal tersebut dikarenakan jumlah dari tenaga kependidikan yang dikatakan cukup namun tidak dengan kualitas yang dimilikinya. Pentingnya untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan supaya dalam manajemen sekolah dapat dilakukan secara profesional, kreatif, dan integratif dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman mengenai pengelolaan pendidikan perlu dikuatkan lagi, karena faktanya berjalannya pendidikan belum tentu mencerminkan pengelolaan yang efektif. Pengelolaan pendidikan pada pendidikan dasar harus disesuaikan dengan standar nasional pengelolaan pendidikan. Dalam suatu penelitian dikatakan bahwa sejauh ini pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar sudah mencapai standar nasional, namun yang kurang memenuhi adalah dalam hal manajemen informasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pandangan ke depan bagaimana cara mengoptimalkan peran individu yang terlibat dalam pendidikan agar terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

#### Abstract

#### Keywords:

*Optimization;  
effectiveness;  
education staff;  
education  
management;*

This study aims to determine the quality and quantity of education personnel and the implementation of education management in elementary schools (SD). Retrieval of data by literature review, a study through the study of various articles, journals and through electronic books on the internet. The results of the study indicate that the problem of the quality and quantity of education personnel is imbalanced, this is because the number of education personnel is said to be sufficient but not with the quality they have. It is important to improve the quality of education personnel so that school management can be carried out professionally, creatively, and integratively in carrying out their duties. The understanding of education management needs to be strengthened again, due to the fact that the course of education does not necessarily reflect effective management. Management of education in basic education must be adjusted to national standards of

education management. In one study it was stated that so far the management of education in elementary schools has reached national standards, but what is lacking is in terms of information management. This research is expected to be a foresight on how to optimize the role of individuals involved in education in order to realize the goals of national education.

---

## 1. PENDAHULUAN

Hakikat manusia yang berkembang tidak melepaskannya dari sebuah proses, seperti proses perkembangan dalam pertumbuhan anggota tubuh, perkembangan kemampuan (hard/soft skill), perkembangan pendidikan, dan perkembangan lainnya. Proses yang dilalui pun terstruktur dengan rapih serta unsur yang terlibat harus memenuhi kategori, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Aisyah (2015: 5) Dalam dinamika pendidikan, manusia akan melalui proses pendewasaan sebagai pengalaman dirinya dalam belajar mengenai keseluruhan lingkungan hidup, baik pendidikan formal (di sekolah) maupun pendidikan non formal (di luar sekolah).

Di Indonesia, program yang mendukung hal tersebut yaitu program wajib belajar. Setiap warga negara Indonesia wajib mengenyam pendidikan selama 12 tahun. Hamalik (2019: 2) mengatakan bahwa peserta didik dapat berkembang dan bertumbuh dalam proses pendidikan bergantung pada dua aspek yang satu dengan yang lainnya mempengaruhi, yakni bakat atau kemampuan yang peserta didik miliki sejak dilahirkan, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi sampai bakat atau kemampuannya tumbuh dan berkembang. Setiap jenjang pendidikan harus memiliki pengelolaan yang baik untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Tidak hanya perihal pengelolaan siswa, pendidik, kurikulum dan pembelajaran, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, pengelolaan tenaga kependidikan juga perlu dikelola sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses pendidikan.

Keberlangsungan pendidikan bergantung pada seberapa kompetennya pendidik dan tenaga kependidikan di suatu sekolah, karena pendidikan sebagai investasi anak untuk masa depan juga penentu kemajuan suatu masyarakat. Terkhusus pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sebagai instansi formal awal pendidikan yang bertanggung jawab mengatur atau memajemen elemen-elemen didalamnya, maka kualitas dan kuantitas pendidik serta tenaga kependidikan perlu memenuhi kriteria yang tepat. Penting sekali memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola pendidikan sehingga dapat dengan mudah menemukan dan menentukan keputusan yang akan diambil demi keberlangsungan pendidikan yang berkembang. Sumber daya manusia yang dibutuhkan senantiasa sesuai dengan kriteria serta kualifikasi yang ditetapkan. Menurut Click or tap here to enter text.ada dua perencanaan dalam tenaga kependidikan, yaitu sumber eksternal dengan dilakukannya rekrutmen dari luar organisasi secara sistematis, dan sumber internal dari bagian organisasi dengan proses mutasi, promosi jabatan, dan lainnya yang tetap memperhatikan proses rekrutmen yang berlangsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 ayat (5) menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sebagai profesi dibidang pendidikan, tentunya tenaga kependidikan diatur oleh standar atau rata-rata kompetensi yang harus dimiliki pada masing individu. Pada setiap lembaga sekolah memerlukan jumlah sumber daya yang cukup serta dengan kompetensi yang mumpuni. Problematika yang terjadi saat ini, pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ketersediaan tenaga kependidikan jarang ditemui. Padahal jika melihat pada fungsi keberadaanya sangat diperlukan untuk keberlangsungan pendidikan. Herlambang (2018:12) mengemukakan bahwa pemikiran orang-orang mengenai pendidikan keluar dari pemahaman dasar yang seharusnya dijadikan landasan pendidikan, juga pemikiran bahwa pelaksanaan pendidikan yang lebih bersifat aturan budaya "rutinitas dan formalitas" dalam dimensi mikro, padahal tujuan ideal dari pendidikan dalam dimensi makro sebagai upaya dalam mentransformasi sosial budaya. Hal ini menjadikan pada sistem tatanan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di Sekolah Dasar (SD) mengikuti pola tradisi atau budaya yang ada seperti faktor keturunan, kerabat, orang yang dipercaya dari pemegang kekuasaan, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukannya revitalisasi pengelolaan pendidikan, khususnya pada tenaga kependidikan yang dapat menunjang jalannya proses pendidikan di Sekolah Dasar (SD).

## 2. METODE

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah menggunakan kajian literatur. Kajian literatur ini merupakan sebuah penelitian melalui pengkajian dari literatur yang ada baik dari artikel yang telah terbit dalam sebuah jurnal maupun melalui buku elektronik yang ada di internet. Sukardi (2013: 33) mengemukakan bahwa kajian literatur ialah sebuah aktivitas yang diharuskan dalam sebuah penelitian, terutama dalam penelitian akademik yang memiliki tujuan utama untuk memperbarui perspektif secara teoritis maupun perspektif fungsi praktis. Karuru (2017: 9) mengungkapkan bahwa kajian literatur memiliki peran yang penting dalam sebuah penelitian, dikarenakan melalui kajian literatur maka dapat memberikan bekal bagi peneliti untuk menemukan pijakan yang kuat yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk topik yang ditelitinya. Adapun langkah-langkah penelitian dari metode penelitian menggunakan kajian literatur sebagaimana disajikan pada gambar 1.



**Gambar 1 Langkah-langkah Metode Penelitian Kajian Literatur Menurut Suryana A (2007)**

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran dan Fungsi Pengelolaan Pendidikan di Sekolah

Pengelolaan pendidikan adalah suatu penyusunan dalam pendidikan yang dilaksanakan dengan aktivitas perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan Staf (staffing), pengkoordinasian, komunikasi, motivasi, mengatur anggaran, mengendalikan, mengawasi, memberi nilai, dan laporan yang disusun secara runtut guna mendapatkan pendidikan yang bermutu). Dalam Farikhah (2015: 120) mengemukakan ada fungsi dalam sebuah pengelolaan pendidikan yakni perencanaan, job description dan struktur organisasi, koordinasi dan komunikasi, pengendalian dan pengawasan, juga adanya solusi untuk memecahkan masalah dan keputusan yang diambil.

#### Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah kegiatan yang dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan ini merupakan sebuah tahap kebijakan dan instrumen juga teknik prioritas yang menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional yang menjadi jembatan antara cita-cita dan impian orang tua, siswa, masyarakat, dan tentunya negara untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam implementasinya sebuah perencanaan harus merujuk pada undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Acuan atau pedoman pelaksanaan rencana pendidikan di sekolah yakni:

- a) Pihak sekolah harus merancang dan mempunyai Standar Operasional untuk mengatur kriteria pengelolaan yang tertulis yang mudah dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan.
- b) Kerangka pedoman sekolah:
  - Memikirkan mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah
  - Melakukan review dan merumuskan kembali dalam jangka waktu yang berkala dan disesuaikan dengan kemajuan masyarakat.
  - Pedoman pengelolaan sekolah terdiri dari:
    1. Kurikulum satuan pendidikan.
    2. Penanggalan pendidikan.
    3. Pengalokasian tugas antara guru.
    4. Pembagian tugas dengan tenaga kependidikan.
    5. Pengaturan akademik.
    6. Peraturan sekolah.
    7. Kode etik sekolah.
    8. Biaya pelaksanaan.
- c) Semua pedoman pengelolaan sekolah tersebut direview sesuai dengan kepentingan dari setiap sekolah.

#### Job description dan Struktur Organisasi

Job description merupakan isi dokumen yang bersifat formal dalam sebuah organisasi sekolah yang berisi mengenai penjelasan kerja maka dari itu hal ini salah satu hal penting sebagai dokumen yang memonitoring pelaksanaan pekerjaan para pegawainya juga sebagai catatan keberhasilan dari pencapaian setiap pegawainya. Contohnya yakni seperti ketua tata usaha memiliki tugas pengkoordinasian semua aktivitas yang memiliki kaitan dengan pengelolaan sekolah, keuangan, laporan, inventaris, juga kesiswaan.

Selanjutnya, struktur organisasi merupakan daftar komponen yang ada di sekolah. Dalam struktur organisasi ini menunjukkan adanya sebuah pembagian kerja dari setiap unit kegiatan yang berbeda. Adanya struktur organisasi ini dari mulai sekolah hingga tenaga kependidikan memiliki tugas, wewenang dan juga tanggung jawab yang rinci mengenai pengelolaan pendidikan. Setiap sekolah pasti memerlukan pengaturan dan susunan pekerjaan pada masing-masing komponen yang ada dalam struktur organisasi yang disebut sebagai job description.

#### Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi merupakan sebuah kegiatan kerjasama antar sumber daya manusia dalam hubungan yang terarah dan produktif untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Lalu komunikasi adalah tahapan mengantarkan dan mendapatkan informasi antara pihak satu ke pihak yang lainnya baik secara lisan maupun tulisan. Perlunya dari koordinasi dan komunikasi ini adalah sebagai usaha untuk meminimalisir kesalahpahaman dari informasi yang akan disampaikan.

### **Pengendalian dan Pengawasan**

Pengendalian merupakan usaha untuk menciptakan organisasi yang kondusif dan efektif dalam proses mencapai tujuan yang ingin dituju. Di dalam prosesnya pengendalian ini memiliki peran sebagai pengendali mutu dari suatu organisasi. Adapun tahapan pengendalian ini adalah sebagai berikut (Farikhah, 2015: 136):

- a. Memberikan penetapan mengenai standar kinerja.
- b. Menimbang kinerja.
- c. Melakukan perbandingan hasil kerja dengan standar yang telah ditentukan.
- d. Menentukan kebijakan atas kecurangan.

Lalu adanya pengawasan sebagai fungsi dari sebuah sistem yang melaksanakan penyesuaian mengenai rencana, dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Tujuan adanya pengawasan adalah untuk dasar bagi pimpinan untuk mengambil sebuah kebijakan dan keputusan yang strategis menuju sebuah organisasi yang lebih baik lagi. Adapun langkah dari mengawasi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan standar dan metode untuk ketercapaian kualitas kerja atau tujuan secara akurat namun mudah untuk dinilai.
2. Menilai ketercapaian kualitas kerja.
3. Menetapkan keselarasan antara kualitas kerja dengan standar yang dibuat.
4. Menentukan kebijakan jika terjadi kecurangan pada hasil nilai.

### **Solusi untuk Memecahkan Masalah dan Keputusan yang Diambil**

Berikut beberapa langkah guna menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan menurut Farikhah (2015) 143-144):

- a. Mengkaji permasalahan yang muncul.
- b. Mencari sebab atau akar dari permasalahan tersebut.
- c. Mencari faktor yang paling memiliki pengaruh yang besar terhadap permasalahan tersebut.
- d. Membuat analisis dengan rencana 5W + 1 H.
- e. Menjalankan rencana.
- f. Memeriksa hasil implementasi rencana.
- g. Membuat rencana untuk meminimalisir masalah yang sama timbul.
- h. Meninjau Kembali permasalahan yang ada.

Dalam sebuah solusi untuk memecahkan masalah tentunya ada keputusan yang diambil. keputusan merupakan jawaban atas persoalan yang dihadapi. Dalam sebuah keputusan tentunya harus memuat jawaban yang dipersoalkan. Keputusan juga dapat diartikan sebagai beberapa jawaban alternatif yang dibuat secara sadar melalui proses analisis berbagai kemungkinan bersama dengan dampak dari keputusan yang diambil tersebut.

### **Standar Pengelolaan Pendidikan yang Ideal.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pasal 49 mengenai standar pengelolaan oleh satuan pendidikan di sekolah dasar ini mengaplikasikan pengelolaan dengan basis sekolah yang mandiri, dapat bekerja sama, berpartisipasi aktif, terbuka, dan akuntabilitas.
- 2) Dalam pasal 60 mengenai standar pengelolaan oleh pemerintah dan juga dalam pasal 59 ayat (1) mengenai standar pendidikan oleh pemerintah daerah ini bahwasannya pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan dalam bidang pendidikan dengan mengutamakan program: a) Wajib belajar, b) Meningkatkan kekikutsertaan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, c) Memberantas buta huruf, d) Menjamin mutu pendidikan, e) Meningkatkan status guru sebagai profesi, f) Standar pendidikan, g) legalisasi pendidikan, h) Meningkatkan mutu pendidikan yang dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, nasional, dan juga internasional, i) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, j) Menjamin kualitas pendidikan nasional.

Dari beberapa pasal di atas beberapa aspek yang perlu dijalankan dan dipenuhi seperti perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 19 Tahun 2007 mengenai standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah.

- a) merencanakan program.  
Perencanaan ini meliputi visi dan misi dari sekolah, tujuan dari sekolah, dan rencana sekolah tersebut.
- b) Implementasi rencana kerja.  
implementasi rencana kerja ini mencakup pedoman untuk sekolah tersebut, format organisasi, realisasi kegiatan, departemen kesiswaan, departemen kurikulum dan realisasi pembelajaran, departemen pendidik dan tenaga kependidikan, departemen sarana dan prasarana, departemen keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, dan peran masyarakat juga kemitraan sekolah.
- c) mengawasi dan melakukan evaluasi

Dalam pengawasan dan evaluasi ini terdiri atas beberapa program seperti program mengawasi, evaluasi mandiri, evaluasi dan ekspansi KTSP, penilaian pendidik dan tenaga kependidikan, dan legalisasi sekolah.

- d) seseorang yang bertanggung jawab memimpin sekolah.
- e) Sistem informasi dan manajemen.
- f) Penilaian yang khusus.

### **Pentingnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan dalam Membangun Efektivitas Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar**

Pendidikan merupakan kegiatan usaha yang sadar serta terencana yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas seorang manusia. Dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar serta terencana yang bertujuan mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran supaya siswa aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki strength dalam spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadiannya, kecerdasannya, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya juga masyarakat, (Rini Y. L). Berbicara mengenai pendidikan, maka tidak jauh dengan faktor kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan. Kualitas yaitu tingkat baik atau buruknya suatu hal, sedangkan kuantitas yaitu tingkat banyak atau sedikitnya (jumlah) suatu hal. Dengan kedua pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa kualitas tenaga kependidikan yaitu tingkat mutu seorang tenaga kependidikan dalam memberikan pendidikan serta pembelajaran kepada siswa untuk memenuhi tanggung jawabnya, (M. Syukron, 2021)

Dalam hal kuantitas, tenaga kependidikan di Indonesia sudah cukup memadai, tetapi permasalahan yang masih dihadapi Indonesia hingga sekarang ini adalah rendahnya kualitas tenaga kependidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. Banyak hal yang sudah dilakukan Indonesia untuk meningkatnya tenaga kependidikan, diantaranya mengembangkan kurikulum, melakukan pelatihan guru, pengadaan buku serta sarana prasarana sekolah. Namun hal-hal tersebut belum cukup memberikan hasil dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan, Dewi N.W.E.P (2017). Dalam hal ini tenaga kependidikan yang berkualitas berarti orang yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan, hingga ia dapat melakukan amanahnya sebagai seorang tenaga kependidikan secara maksimal serta memiliki pengalaman yang cukup di bidangnya,

Kualitas serta kuantitas tenaga kependidikan sangat berkaitan erat dengan pengelolaan pendidikan. Prihantini dan Rustini (2020: 1-2) mengemukakan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan pengaplikasian dari konsep manajemen, yang berfungsi dalam tercapainya tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Pemahaman konsep manajemen dalam pengelolaan pendidikan sangat diperlukan agar pengelolaan tersebut berorientasi pada kualitas. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan, guru harus menguasai perencanaan kegiatan pembelajaran, melaksanakan perencanaan, melakukan evaluasi dari proses pembelajaran.

Rahayu M. (2015) berpendapat bahwa di sekolah dasar, pengelolaan pendidikannya belum memperlihatkan kualitas pengelolaan yang sama dengan manajemen dan konsep standar pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, hal ini terlihat dari nilai akreditasi sekolah yang berbeda-beda. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui standarisasi pengelolaan pendidikan dasar, tentu saja memerlukan kesanggupan dari seluruh pihak untuk melaksanakan perubahan. Berkaitan dengan hal ini ini pemimpin sekolah atau kepala sekolah haruslah bisa memimpin perubahan yang ada dengan mengajak seluruh anggota sekolah yang merupakan tenaga kependidikan untuk mempelajari bagaimana mengelola pendidikan secara maksimal. Pemimpin sekolah haruslah bisa menjaga supaya komitmen untuk melaksanakan perubahan tetap ada, memiliki perbaikan dan inovasi. Lalu sebagai manajer haruslah bisa mendesain struktur organisasi, serta membangun budaya organisasi sekolah yang tumbuh, tidak tertutup (tertutup), serta tidak takut mengambil resiko.

### **Implementasi Pengelolaan Pendidikan Di Indonesia**

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) berisikan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menyusun kurikulum dengan mengarah kepada standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar proses, dan standar penilaian, dengan tetap berfilosofi pada panduan yang telah disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Mengenai standar pengelolaan pendidikan berarti standar yang digunakan untuk mengelola pendidikan dalam satu lembaga pendidikan tersebut. Ada enam hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan sesuai ketetapan Permendiknas No.19 tahun 2007 khususnya yang dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu: perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi program, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus. Fatah (2004) mengatakan terlaksananya suatu program pengelolaan harus didukung oleh fungsi-fungsi dari manajemen penyelenggaraan pendidikan itu sendiri seperti planning, organizing, actuating, dan controlling.

Perencanaan adalah sebuah rancangan yang dibuat menjadi keputusan atau proses pengembangan dan filtrasi dari berbagai rancangan untuk memecahkan masalah tertentu. Didalam proses perencanaan terdapat proses pengorganisasian yang relevan dengan visi dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Memanajemen suatu organisasi (sekolah) diperlukan pengarah yang harus diterapkan setelah adanya perencanaan dan sumber daya. Pelaksanaan rencana kerja merupakan implementasi dari pengorganisasian dan pengarah sebelumnya.

Pelaksanaan meliputi semua pihak yang ada dan disekitar sekolah dengan diatur oleh satuan pendidikan yang telah dibentuk dalam cakupan sekolah. Bidang dalam pelaksanaan kegiatan sekolah seperti bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, dan humas/peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah akan disesuaikan dengan bidang-bidang garap yang bersangkutan.

Pengendalian atau pengawasan merupakan kegiatan monitoring untuk mengukur sejauh mana rencana atau rancangan yang telah dibuat dapat terlaksana dan tujuan-tujuan dapat tercapai. Kegiatan ini juga dapat berupa proses mengoreksi serta memperbaiki kesalahan atau hambatan yang mengganggu mencapai tujuan. Pengawasan akan berkaitan pada kualitas yang tercapai, contohnya bentuk akreditasi oleh pihak pemerintah atau pihak eksternal (Becket dan Brookes, 2008). Berbagai macam pengawasan yang bisa dilakukan diantaranya: pelaporan, pemantauan, supervisi, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan sering disebut dengan evaluasi pembelajaran, tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sistem pembelajaran baik menyangkut tujuan, sumber, materi, model, media, metode, lingkungan serta sistem penilaian belajar. Berbicara pendidikan dalam lingkup peserta didik, evaluasi berfungsi untuk mencari tahu tingkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai pada peserta didik setelah berlangsungnya pembelajaran.

Kolaborasi, jaringan partisipasi, dan peran dari berbagai pihak dibutuhkan dalam pengelolaan pendidikan sehingga harus adanya suatu kepemimpinan yang menyeluruh. Pada proses ini, pihak tertinggi di sekolah yaitu kepala sekolah harus bisa membangun interaksi dengan elemen-elemen yang ada secara formal dan informal juga menjadikan semua pihak dapat berkontribusi dengan sama sesuai arahan pemimpin. Serangkaian tindakan yang bisa mempengaruhi orang lain demi tercapainya tujuan yang ditentukan merupakan wewenang dari pemimpin. Kepemimpinan seorang pemimpin akan berkaitan dengan lingkungannya, begitupun dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan membutuhkan kemampuan tersebut agar menjadikan organisasi (sekolah) berjalan dengan baik, efisien, dan efektif.

Sistem informasi manajemen menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan pendidikan, dimana keberadaannya mengenai informasi yang tepat waktu bagi suatu manajemen eksternal ataupun internal akan mendorong serta mempercepat proses pengambilan keputusan pada proses sebelumnya. Pengelolaan standar informasi manajemen sekolah tampak dari sejumlah indikator berikut (B.N.S.P. 2007:38) : 1) Memanajemen sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendorong administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel. 2) Mempersiapkan fasilitas atau sarana dan prasarana informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses. 3) Memberikan tugas pada seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permohonan informasi maupun pemberian informasi atau laporan dari masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan sekolah/madrasah berupa media lisan maupun tulisan dan disertakan bukti seperti rekaman dan dokumentasi. 4) Menyampaikan data informasi sekolah/ madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Perkembangan pengelolaan pendidikan di Indonesia kian bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi. Hal tersebut dikarenakan pengaruh dari pergeseran paradigma para pemegang kebijakan publik (Jahari, 2013) Sebagai permasalahan yang paling dikritisi pada pergeseran ini adalah pengambilan kebijakan yang dianggap kurang peka dan kurang memahami problematika dan tantangan pendidikan yang nyata dihadapi, selain itu juga sentralisasi pada prosesnya cukup lambat karena melihat aspek jarak dan sistem birokrasi itu sendiri. Sebetulnya pada paradigma ini baik sentralisasi maupun desentralisasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun situasi dan kondisi lah yang menjadikan pengelolaan pendidikan ini mengalami pergeseran yang tentunya tetap pada tujuan yang telah ditetapkan. Berikut perbedaan dari kedua paradigma pengelolaan pendidikan tersebut.

#### 1. Paradigma lama

- Sentralistik (peran ada pada pemerintah pusat)
- Kebijakan atau pendekatan yang top down
- Orientasi pengembangan parsial; pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan teknologi perakitan
- Peran pemerintah sangat dominan
- Lemahnya peran institusi non sekolah

#### 2. Paradigma baru

- Desentralistik (peran ada pada pemerintah daerah)
- Kebijakan atau pendekatan yang bottom up
- Orientasi pengembangan holistik; pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, kesadaran hukum
- Meningkatkan peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif
- Pemberdayaan institusi masyarakat, keluarga, LSM, pasantren, dan dunia usaha

Implementasi dari paradigma baru yaitu desentralisasi dapat terlihat dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai salah satu wujud reformasi pendidikan di Indonesia. Tujuan dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah untuk memajukan mutu pendidikan, kepedulian warga sekolah dan masyarakat, beserta tanggung jawab semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan yang didalamnya terdapat kemampuan kompetensi

untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan. Dalam hal ini pengelolaan pendidikan memposisikan sekolah sebagai manajer pendidikan yang melayani kepentingan yang ada. Adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam dunia pendidikan memberikan banyak manfaat diantaranya sebagai berikut; 1) Dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan sumber daya yang tersedia demi perkembangan kemajuan sekolah. 2) Lebih mengenal kebutuhan lembaga yang akan dikembangkan. 3) Pengambilan keputusan partisipatif sesuai dengan kebutuhan. 4) Keterlibatan semua warga sekolah sehingga adanya transparansi dan demokrasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitian yang dilakukan Rahayu (2015) yang mengidentifikasi masalah ketidaksesuaian yang terjadi antara pelaksanaan pengelolaan pendidikan dengan konsep standar pengelolaan pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan menggunakan desain evaluasi model stake, penelitian ini memfokuskan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu deskripsi dan penilaian. Dalam pendidikan ada 3 tahap yaitu konteks, proses, dan hasil. Apabila memberikan nilai suatu program pendidikan, terlebih dahulu harus adanya perbandingan antara satu program dengan yang lainnya menunjukkan relatif sama. Tempat penelitian adalah beberapa sekolah dasar di kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman. Populasi dalam penelitian adalah seluruh kepala sekolah yang berjumlah 25 orang, seluruh guru berjumlah 176 orang. Variabel yang menjadi topik penelitian adalah perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi, kepemimpinan, dan sistem manajemen. Mengenai pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, angket, dan dokumentasi.

Hasil yang didapat pada penelitian tersebut mengatakan bahwa pengelolaan terbaik tampak pada aspek pelaksanaan program yaitu 88,3%, dilanjutkan dengan perencanaan program 62,78%, kepemimpinan kepala sekolah 53,4%, dan paling rendah pada komponen sistem manajemen informasi pendidikan dasar yaitu 26,74%. Dengan demikian manajemen pendidikan di Sekolah Dasar dalam hal manajemen informasi faktanya paling kurang mendapat atensi atau masih jauh dari rata-rata atau standar nasional pengelolaan pendidikan. Sejauh ini mengacu pada penelitian tadi dapat disimpulkan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar sudah mencapai standar nasional, namun akan lebih berkembang lagi jika semua aspek termasuk sistem manajemen informasi dapat dikelola kembali dengan baik maka proses pengelolaan pendidikan akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

#### 4. SIMPULAN

Tenaga pendidikan di Indonesia sudah dilakukan secara maksimal, yaitu melalui mengembangkan kurikulum, melakukan pelatihan guru, dan pengadaan buku serta sarana prasarana sekolah. Namun hal tersebut masih belum cukup memberikan hasil dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di Indonesia. Perkembangan pengelolaan pendidikan di Indonesia kian bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi, Hal ini dikarenakan pengambilan kebijakan yang dianggap kurang peka dan kurang memahami problematika tantangan pendidikan yang nyata, terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah di Indonesia, dalam pengelolaannya akan lebih efektif jika semua aspek dan sistem manajemen informasi dijalankan sebagai prioritas sehingga tujuan pendidikan nasional akan sesuai dan tercapai.

#### 4. REFERENSI

- Aisyah, A, et al. 2015. *Landasan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- B.N.S.P. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BNSP.
- Dewi N.W.E.P. 2017. "Meningkatkan Kualitas Guru Untuk Pendidikan yang Lebih Baik."
- Farikhah, S. 2015. *Manajemen Lembaga Pendidikan*. Sleman: Aswaja Pressindo.
- Hamalik, O. 2019. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlambang, Y. T. 2018. *Pedagogik: Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam Multiperspektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jahari, J. 2013. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Fajar Media.
- Jahari, J. 2014. *Pengelolaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Bandung: Fajar Media.
- Karuru, P. 2013. "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian. *Jurnal keguruan dan Ilmu Pendidikan*." 2(1):1-9.
- M. Syukron. 2021. "Kualitas Pembelajaran Guru."
- RiniYL. n.d. "Hakekat, Tujuan, dan Proses."
- Rahayu M. 2015. "Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 8(1):67-68.
- Rustini.T, Prihartini. 2020. *Pengelolaan Pendidikan*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.